



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Juni 2021

Halaman: 1

Batal Lockdown, Perketat PPKM Mikro

**HB X: Kami Tak
Kuat Beri Makan
Seluruh Warga DIJ**

JOGJA, Radar Jogja - Lockdown atau karantina wilayah akhirnya tidak jadi diberlakukan di DIJ. Gubernur Hamengku Buwono X memilih melakukan peng-
etatan kebijakan pemberlakuan pemba-

tasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown untuk meng-

**BANGKIT
BERSAMA**



hadapi meledaknya kasus penularan Covid-19 di DIJ. Keputusan ini ditempuh usai rapat koordinasi antara gubernur dengan perwakilan RS rujukan Covid-19, akademisi, serta bupati dan wali kota se-DIJ ■

► **Baca Batal...** Hal 3



BERI KEPUTUSAN: Gubernur HB X bersama bupati-wali kota se-DIJ usai rapat membahas perkembangan kasus Covid-19, di Kepatihan, kemarin (21/6).

Batal Lockdown, Perketat PPKM Mikro

Sambungan dari hal 1

Pertemuan dilaksanakan di Kompleks Kepatihan, kemarin (21/6) sore.

Dalam rapat itu Gubernur HB X meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat dan membentuk

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tiap RT/RW. Pasalnya, Satgas memiliki peran vital dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan massa di level paling bawah.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar

masyarakat. Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro. "Perlu pembatasan di antara mereka yang ada di setiap kelurahan. Satgas yang belum terbentuk, mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar HB X. Gubernur lalu menjelaskan

soal wacana *lockdown* yang dulu sempat dilontarkan. Ia menjelaskan itu merupakan opsi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan. Kebijakan itu, diakui sulit untuk dilakukan. Pasalnya, bakal membawa konsekuensi besar.

Pasca karantina wilayah diber-

lakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu, sehingga Pemprov DIJ harus menanggung segala kebutuhan warganya. Ia mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DIJ. "Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya, kalau kita tidak kuat," terangnya.

Ketika disinggung mengenai aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Pasalnya, bupati dan wali kota dianggap paling tahu tentang kondisi nyata di lapangan.

Kepala daerah misalnya dapat meniru langkah bupati Banjarnegara untuk menutup sejumlah destinasi wisata pada akhir pekan karena tingkat kunjungan selalu membludak. "Terserah bupati wali kota, saya tidak ada kebijakan seperti itu (penutupan tempat wisata, Red). Kabupaten kota bisa melihat kondisi rilnya. Pengalaman seperti penutupan Parangtritis kan sudah jelas," tandasnya.

16 Pedagang Pantai Drini Terpapar Korona

Belasan pelaku wisata Pantai Selatan Gunungkidul terpapar virus korona. Mereka merupa-

kan pedagang di kawasan Pantai Drini Kalurahan, Banjarejo, Kaparewon Tanjungsari.

Panewu Tanjungsari Rakhmadian Wijayanto mengatakan, beberapa hari lalu 16 pedagang terkonfirmasi positif Covid-19. Karena pasien kategori orang tanpa gejala (OTG) mereka melakukan isolasi mandiri. "Sumber penularan menindatkan juti hasil *tracing* klaster rasulan," kata Rakhmadian Wijayanto saat dihubungi kemarin (21/6).

Untuk mengantisipasi penularan, petugas melakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan. Kepada warga yang selama ini kontak erat dengan pasien Covid-19, diminta memeriksa diri ke puskesmas. "Sejauh ini (kasus covid) tidak mempengaruhi aktivitas wisata," ujarnya.

Disinggung mengenai peta zonasi sebaran Covid-19, wilayahnya terdiri dari lima kalurahan meliputi, Kemiri, Kemandang, Banjarejo, Ngestirejo dan Hargosari. Sebagian besar masuk kategori aman karena berada di zona hijau. "Satu RT masuk zona oranye dan zona merah di Banjarejo," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Gunungkidul Hary Sukmono

memastikan belasan pedagang kawasan pantai yang terkonfirmasi Covid-19 tidak termasuk klaster. Pasien OTG awal mula terkena korona dari aktivitas sosial masyarakat. Dengan demikian kondisi yang ada tidak mempengaruhi aktivitas wisata di kawasan tersebut.

"Kebijakan lanjutan menunggu intruksi pimpinan," kata Hary Sukmono.

Sementara itu, Direktur RSUD Wonosari Heru Sulistyowati mengatakan, ratusan warga saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Menurutnya, pasien isolasi mandiri tidak ada evaluasi swab. Jika selesai isolasi secara medis biasa diartikan aman dan tidak lagi menularkan virus ke orang lain. "Menurut teori begitu," kata Heru.

Terpisah, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengaku hanya bisa menunggu kebijakan resmi dari Pemprov DIJ terkait Covid-19. Pihaknya siap mengikuti instruksi jika keputusan *lockdown* resmi diberlakukan.

"Kegiatan masyarakat saat ini masih berpatokan pada instruksi bupati. Antara lain dengan membatasi jumlah massa hingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan," kata Sunaryanta. (kur/gun/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005